



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BOY FIRMANSYAH JHON
2. Jabatan : BENDAHARA PENERIMA
3. NHK : 629813

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	429.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 244 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA TIDORE KEPULAUAN , HASIL SENDIRI Rp. 98.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA TIDORE KEPULAUAN , HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000		
3. Tanah Seluas 192 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 72.000.000		
4. Tanah Seluas 287 m2 di KAB / KOTA BANYUASIN, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000		
5. Tanah Seluas 330 m2 di KAB / KOTA KOTA TIDORE KEPULAUAN , HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000		
6. Tanah Seluas 1.844 m2 di KAB / KOTA KOTA TIDORE KEPULAUAN , HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	39.500.000
1. MOTOR, HONDA NF 100 TD/SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000		
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	206.000.000

**F. HARTA LAINNYA****Sub Total**

Rp. ----

Rp. 674.500.000

III. HUTANG

Rp. 64.159.303

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 610.340.697

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila di kemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.